

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hapsara, R.H.R., 2014, *Filsafat, Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mochtarom, Achmad, 2011, *Siapa Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional*, Pusat Studi Hukum & Bisnis, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murti, Bhisma, 2000, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Situmorang, Chazali H, 2013, *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*, Penerbit Cinta Indonesia, Depok.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2016, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zain, Aziar, 2016, *Bom Waktu Utang Bailout*, Penerbit Mer-C Publishing, Jakarta.

Jurnal

- Prasetyo, Adhi. BPJS Kesehatan Defisit Lagi, Bailout Lagi. *Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI*. Vol. III, Edisi 19, Oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4962 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

Peraturan Presiden No.72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193)

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42)

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/16/PBI/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6281)

Peraturan Menteri Keuangan 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1256)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286)

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1712)

Situs Daring

DPR RI. 2018. Komisi IX Serius Selamatkan BPJS Kesehatan. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22153/t/Komisi+IX+Serius+Selamatkan+BPJS+Kesehatan>, diakses tanggal 2 Agustus 2020.

Galih Gumelar, “Pangkal ‘Penyakit’ Defisit BPJS Kesehatan”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180919164958-78-331498/pangkal-penyakit-defisit-bpjs-kesehatan> , pada tanggal 18 Mei 2019

Humas BPJS Kesehatan, “Sejarah Perjalanan Jaminas Sosial di Indonesia”, diakses melalui <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> pada tanggal 18 Mei 2019

Kementerian Keuangan,2017, *Dampak Bail-out Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/dampak-bail-out-pada-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn/> , diakses tanggal 17 September 2020

M. Januar, Rizki..2019. Menkeu Terbitkan 3 Aturan Baru Terkait Iuran BPJS Kesehatan.<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc94f4b589d4/men>

[keu-terbitkan-3-aturan-baru-terkait-iuran-bpjs-kesehatanm](#), diakses pada tanggal 2 Agustus 2020.

Mahkamah Konstitusi, 2015, *Ahli: BPJS Wujud Negara Kesejahteraan*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10795> , diakses tanggal 17 September 2020.

Martabat, “BPJS Hanya Dapat Dibubarkan Dengan Undang-Undang Dan Tidak Dapat Dipailitkan”, diakses melalui <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/282> , pada tanggal 6 Januari 2020.

Muhammad Choirul, “Fantastis! Total Bailout BPJS Kesehatan Sudah Rp 10,25 T”, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181211165142-4-45887/fantastis-total-bailout-bpjs-kesehatan-sudah-rp-1025-t> , pada tanggal 19 Mei 2019

Payfazz, “Pilih Asuransi Kesehatan mana? BPJS atau Asuransi Swasta?”, diakses melalui <https://www.payfazz.com/blog/pilih-mana-bpjs-atau-asuransi-swasta> , pada tanggal 2 November 2019.

Stabilitas, “Dari Bail-Out ke Bail-In”, diakses melalui <http://stabilitas.co.id/home/detail/dari-bail-out-ke-bail-in> , pada tanggal 4 Januari 2020.

Tempo, 2018, “RS Swasta Keluhkan Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan Sering Telat” <https://bisnis.tempo.co/read/1060426/rs-swasta-keluhkan-pembayaran-klaim-bpjs-kesehatan-sering-telat> , diakses pada tanggal 2 Agustus 2020.

Wibi Pangestu Pratama, “Berapa Utang BPJS Kesehatan?”, diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20191111/215/1169046/berapa-utang-bpjs-kesehatan> , pada tanggal 27 Desember 2019.

Zahrul. 2018. *Alasan BPJS Kesehatan Minta Bantuan Ke Bank*. <https://klikbabel.com/2018/09/13/ini-alasan-bpjs-kesehatan-minta-bantuan-ke-bank>, akses pada tanggal 2 Agustus 2020.